

STRATEGI BERBASIS MAQASHID SYARIAH DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI JAMBI

Sucipto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN STS Jambi
sucipto.djaafar@uinjambi.ac.id

Abstrak

Strategi yang berbasis pada maqashid syariah sangat jarang ditemukan, namun ia merupakan prinsip dasar bagi pengembangan murni lembaga keuangan yang berbasis pada syariah dan bertujuan untuk mencapai falah dan maslahah. Tulisan ini dimaksudkan untuk mengkaji strategi untuk meningkatkan daya saing lembaga keuangan syariah di Provinsi Jambi yang didasarkan kepada strategi berbasis maqashid syariah. Tulisan ini menjelaskan bahwa kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Jambi memiliki tingkat efisiensi yang berbeda-beda bahwa, untuk mensiasati demi meningkatnya daya saing lembaga keuangan syariah agar diperkuat pada aspek modal sosial berbasis maqashid syariah. Modal sosial Islam dapat dibentuk dari kepercayaan antara lembaga dengan nasabah, dan menjadi intrumen dari aksi yang bertalian dengan lembaga dalam setiap agen sosial ekonomi, nilai *ukhuwah* dan solidaritas dapat ditanamkan pada nasabah dan lembaga keuangan syariah agar dapat memahami prinsip yang lebih baik dari pembagian resiko sebagai ganti dari hanya hutang nasabah dalam keikutsertaan liabilitas hutang pada kasus lembaga keuangan konvensional

Kata Kunci: Strategi, Maqashid Syariah, LKS, Jambi

PENDAHULUAN

Persoalan strategi daya saing cukup banyak yang telah mengkaji dan mengembangkan hingga yang sangat praktis, namun jarang ditemukan strategi yang berbasis pada maqashid syariah, karena ia sebagai prinsip dasar bagi pengembangan murni LKM berbasis pada syariah yang bertujuan untuk mencapai falah dan

maslahah¹. Prinsip tersebut didasarkan pada aksioma etik dari keuangan dan kelembagaan syariah, prinsip yang mengatur strategi daya saing untuk Lembaga Keuangan mikro syariah seperti BMT dan Koperasi jasa keuangan syariah, di mana dewasa ini telah saling berebut peran dan pengaruh dalam Lembaga keuangan.

Tonggak dasar maqashid syariah selama ini berasal dari Imam Al-Ghazali, As-Syatibi, Alalfashi, Ahmad al-Raysuni dan Abdul wahab Khallaf. Lembaga non-syariah yang kemunculannya sangat cepat dan terstruktur di berbagai wilayah di Jambi, dengan perkembangan LKM sebagian besar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam layanan jasa keuangan pada kelompok miskin dan berpenghasilan miskin dan rendah, termasuk memenuhi kebutuhan kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah untuk dapat memiliki akses yang lebih besar.

Persoalan persaingan kualitas baik layanan untuk membiayai usaha kecil yang mencakup fasilitas kredit, tabungan, asuransi dan transfer uang, karena sebagain nasabah keuangan mikro sulit untuk mendapatkan keuntungan dari lembaga keuangan konvensional atau formal. Sebagaimana Sajeda et al (2003) mengungkapkan bahwa program kredit mikro seperti Grameen Bank populer mencapai relatif miskin dan rentan di dua desa Bangladesh. Sementara kredit mikro berhasil menjangkau masyarakat miskin, tetapi kurang berhasil mencapai rumah tangga yang rentan miskin.

Jangkauan (*Outreach*) didefinisikan sebagai kemampuan LKM untuk menyediakan jasa keuangan berkualitas tinggi untuk sejumlah besar klien. Indikator kinerja jangkauan termasuk perubahan dalam jumlah klien, persentase klien perempuan, total nilai aset, jumlah tabungan pada deposito, nilai outstanding kredit, rata-rata tabungan deposito ukuran, ukuran rata-rata kredit dan jumlah cabang. Persoalan jangkauan yang terbatas Lembaga keuangan mikro syariah karena telah sedikit tersebar, walaupun undang-undang telah dibuat di beberapa Negara tetapi permintaan untuk LKM menjadi tidak populer, seperti di Iran, sedangkan LKM di Negara yang lainnya telah muncul dengan respon permintaan yang cukup

¹ Akram Khan, Introduction to Islamic Economic (

popular. Sebagian menanggapi lemahnya dan kurang optimalnya dukungan regulasi negara, seperti di Suriah.

Anyanwu (2004) mengungkapkan bahwa permintaan layanan keuangan mikro yang tinggi dan meningkat di Nigeria. Terus menerus memberhentikan tenaga kerja dari kedua sektor dan meningkatnya jumlah pengangguran lulusan dari sekolah dan perguruan tinggi adalah mendorong sejumlah besar populasi ke dalam kegiatan sektor informal. Juga pasar domestik besar dengan lebih dari 130 juta orang membutuhkan berbagai barang dan jasa termasuk jasa keuangan. Oleh karena itu, pertumbuhan kegiatan keuangan mikro mencerminkan perluasan kegiatan sektor informal dan mengesampingkan sebagian besar populasi yang aktif secara ekonomi dari berbagai jasa keuangan sektor formal. Sebuah studi yang dilakukan oleh Bank Sentral Nigeria (2001) mengidentifikasi 160 lembaga keuangan mikro yang terdaftar di Nigeria. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa pada kuartal ketiga tahun 2001, responden memiliki tabungan agregat senilai \$ 645.000 dan outstanding kredit dari \$ 418.000 yang menunjukkan transaksi bisnis besar di sektor ini.²

Persoalan selanjutnya telah terstandar melalui keberhasilan Muhamad Yunus dalam mengembangkan LKM di Bangladesh yang terkenal dengan Grameen Bank (GB) telah menginsiprasi lembaga keuangan mikro syari'ah di Indonesia.³ Sedangkan di Indonesia pengelolaan lembaga keuangan mikro sudah berkembang cukup lama, Menurut Wijono (2005) LKM sudah banyak dibentuk dan tersebar dengan karakteristiknya masing-masing namun fungsinya sama sebagai intermediasi suatu perekonomian.⁴

Oleh sebab ini latar belakang untuk penelitian yang lebih sistematis keuangan mikro syariah di Indonesia, negara muslim terbesar, di mana jumlah keuangan mikro syariah, formal dan semi-formal, telah berevolusi sejak tahun 1990 secara

²Gumel Gambo Babandi, Micro Finance Institutions in Nigeria Outreach and Sustainability: Questionnaire Survey Findings, *International Journal of Business and Social Science*, Special Issue - May 2011, Vol. 2 No. 9, hlm. 127.

³M Amin Arziz, Pendekatan Grameen Bank untuk BMT, Republika online, 27 Agustus 2009

⁴Wijono dalam Rachmat Hendayana dan Syahrul Bustaman, *Penomena Lembaga keuangan Mikro Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan* (Bogor, Balai Pengkajian dan pengembangan teknologi Pertanian, 2006), hlm. 1.

paralel. Perbankan syariah kini resmi diakui sebagai bagian dari sistem *dual banking* di Indonesia. Kurang luas permintaan populer, pengalaman berbeda dengan sub-sektor. Hanya bank-bank komersial telah berhasil memperoleh seni perbankan syariah dengan melatih orang-orang muda dan dinamis, namun kurang pengalaman dalam keuangan mikro.

Dari sisi kebijakan Pemerintah berupa bantuan dana bagi LKM di Jambi cukup besar dan diharapkan dapat memberi dampak positif bagi keberlangsungan LKM tersebut, namun masih saja ditemukan LKM yang tidak menggunakan dana sesuai tujuan program bantuan pemerintah, penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia, seleksi, perencanaan, pembinaan, pengawasan, serta kebijakan pemerintah, tingkat pengembalian yang rendah yang diakibatkan gagal dalam meningkatkan kinerjanya.⁵ Hal ini menegaskan bahwa Pola-pola bantuan teknik yang kurang efektif, antara lain karena penerapan pola umum tersebut secara atas-bawah (top-down) kurang mempertimbangkan aspek kelayakannya menurut kondisi spesifik obyek binaan di lapangan, serta kurang konsistennya dukungan sumberdaya dan lemahnya manajemen dan belum efektifnya mekanisme bawah-atas (*bottom-up*) di lapangan. Kucuran dana yang diberikan oleh pemerintah belum mengakomodir kebutuhan yang betul-betul real dari koperasi/UMKM.

Pembiayaan syariah pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi dalam laporan neraca keuangan bulan februari tahun 2012 sebesar 2,7 milyar, nilai ini akan tidak sebanding dengan keberadaan LKM syariah di Jambi. Sedangkan dengan kaitan potensi kapasitas Lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT yang memiliki keunggulan utuh bila dibandingkan dengan LKM yang lain. BMT bisa memfungsikan diri sebagai jasa keuangan langsung ke sektor riil, memberikan dana sosial sebagai jaminan sosial melalui pengelolaan dana Baitul Maal seperti penghimpunan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh serta Wakaf dan memiliki potensi mengembangkan dana ‘*tabaru*’ yang disetor oleh anggota sebagai ‘asuransi bersama’ yang dapat dimanfaatkan dalam kondisi darurat. Konsep ‘asuransi rakyat kecil’ ini

⁵Haryadi Kamal, Profil dan Permasalahan UMKM Di Provinsi Jambi (Studi Potensi dan Pembinaan UMKMdi Provinsi Jambi), 2009, hlm. 30.

merupakan pemanfaatan jaringan *ukhuwah* diantara anggota untuk dapat saling menanggung, sehingga dapat menjamin distribusi rasa keadilan dan kesejahteraan pada masyarakat.⁶

Persoalan kapasitas lembaga yang kurang menginovasi produk-produk layanan yang dapat menjawab kebutuhan dan permintaan masyarakat di Jambi yang kian meningkat, sebab utama LKM syariah biasa terkesan lemah dalam mensosialisasikan kapasitas lembaga secara legal karena keterbatasan pengetahuan legalitas usaha dan apriori terhadap peraturan daerah yang sering berubah, belum lagi regulasi yang dilakukan pemerintah daerah tidak memiliki kesamaan visi dan misi.

Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah di kota Jambi memiliki tingkat efisiensi yang berbeda-beda.⁷ Karena itu pilihan masyarakat akan LKM syariah dipilih berdasarkan tingkat efisiensi yang optimum, kemudian strategi LKM syariah dalam operasionalisasi dituntut sesuai dengan kebutuhan dan permintaan nasabah. Fakta, secara empiris bank penyedia layanan kredit mikro bersaing ketat untuk merebut pangsa pasar kredit mikro yang masih luas.

Propinsi Jambi menurut Mulya Siregar ada 50% responden berpotensi untuk menjadi mitra bank syariah,⁸ sehingga dengan potensi ini LKM Syariah di Jambi dapat menjadi patner untuk mengakomodir potensi tersebut. Jumlah LKM Di Jambi sebagaimana data Departemen koperasi dan usaha kecil menengah menunjukkan potensi LKM di Jambi, data tersebut menjelaskan LKM yang beroperasi aktif sebagai potensi LKM syariah menjanjikan untuk dapat bertahan (*sustainability*), didukung dengan cukup besarnya jumlah LKM dibanding wilayah Jambi yang dapat dicover oleh keberadaan LKM, kemudian dukungan dari jangkauan sebagian besar wilayah Jambi relative terjangkau. Jumlah LKM yang ada

⁶ Karnaen A.Purwaatmaja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Jakarta, Usaha Kami, 1997) hal 113-124

⁷ Besse Widiwaati, *Analisis Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada Baitul Mal Wattamwil di Provinsi Jambi)* (Jurnal Manajemen dan Pembangunan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Vol 2 No 2 Tahun 2003)

⁸ Mulya Siregar, Agenda Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Mendukung Sistem Ekonomi Yang Sehat Di Indonesia: Evaluasi, Prospek Dan Arah Kebijakan, *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002, hlm. 53.

di Jambi diperkirakan tidak jauh berbeda dengan jumlah desa di Jambi, terdapat 3,263 dengan kategori beroperasi masih aktif dan beroperasi tidak aktif berdasarkan kategori tersebut LKM Jambi yang aktif 2,346 dan tidak aktif 917 dengan potensi anggota aktif 352,477 dan aktif 253,593 orang tidak aktif 98,884.⁹

Oleh karena itu berdasarkan data di atas, Jambi memiliki potensi LKM yang kuantitas dari LKM yang cukup besar dan dapat didayagunakan untuk kekuatan kapasitas lembaga yang efektif dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan mengentaskan kemiskinan.¹⁰ Maka akan berdampak cukup positif bagi ekonomi wilayah.

Penelitian ini akan melakukan pemetaan ketersedian LKM syariah di setiap kecamatan dan kelurahan merupakan potensi Lembaga keuangan Mikro kelompok muslim non-bank, pemetaan ini akan menyangkut dukungan infrastruktur, dilakukan secara internal pada LKM syari'ah non-bank diasumsikan memiliki keterbatasan sumberdaya manusia, belum efektifnya manajemen yang berdampak pada kurang efisien dan keterbatasan modal. Potensi infrastruktur LKM yang tampak seadanya namun dapat menjadi *home industri* untuk berkembangnya LKM syariah di Kota Jambi, kantor LKM syariah memiliki fungsi ganda satu sisi merupakan rumah tinggal pengelola LKM syariah dan kantor LKM Syariah. Kondisi ini berdampak pada pelayanan LKM syariah non bank terhadap usaha mikro masih lebih ekonomis.

Akhirnya kompleksitas dalam pemetaan pengembangan LKM syariah di Kota Jambi akan sangat penting perannya dalam membantu investasi bagi usaha mikro dan kecil. Penelitian ini akan menjelaskan peta potensial LKM syariah non bank di kota Jambi. Sehingga ditemukan sebuah formulasi strategi yang efektif dalam pengembangan LKM syariah non-bank di kota Jambi.

⁹Departemen koperasi RI, Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi 30 Desember 2010.

¹⁰Ibid.,

LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DI PROVINSI JAMBI.

Berkaitan dengan pengembangan usaha maka mau tidak mau harus melihat aspek ketersediaan modal, berbicara pemenuhan kebutuhan modal bagi usaha ini akan berkait langsung dengan realitas Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada. Rata-rata kebutuhan dana untuk usaha mikro adalah Rp 1 juta per unit usaha sementara untuk usaha kecil sebesar Rp 50 juta. Dalam bentuk kelembagaan bank yang bersentuhan langsung dengan UMKM tahun 2005 bisa dijumpai lebih 2.427 BPR, 86 BPRS, 3.694 BRI Unit dan 5.345 Badan Kredit Desa (BKD). Dalam bentuk non-bank; secara formal terdapat Koperasi dengan 1.097 unit dan 1.620 Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) sedangkan yang non-formal yang masyur adalah Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang mencapai 3.037 unit.

Keuangan mikro secara prinsip meliputi kredit mikro, simpanan mikro, asuransi mikro dan transfer uang kepada masyarakat miskin. Kredit mikro yang dipraktekkan untuk pinjaman tanpa jaminan yang biasanya peminjam atau anggota dari koperasi yang tidak mendapatkan akses untuk kredit tidak digaji.¹¹

Propinsi Jambi menurut Mulya Siregar ada 50% responden berpotensi untuk menjadi mitra bank syariah,¹² namun tidak semua dapat mengakses lembaga keuangan seperti Bank, karena persoalan jangkauan dan kesulitan pada standar kredit yang ketat sehingga potensi bagi LKM Syariah di Jambi cukup mencolok, selain itu secara sosial masyarakat Jambi yang relative agamis dan agraris beberapa yang masih tabu pada distriminasi syariah dan non syariah membuka pintu LKM syariah dapat menjadi patner untuk mengakomodir potensi tersebut.

Berdasarkan jumlah LKM di Jambi sebagaimana data Departemen koperasi dan usaha kecil menengah menunjukkan potensi LKM di Jambi, data tersebut menjelaskan LKM yang beroperasi aktif sebagai potensi LKM syariah menjanjikan

¹¹ Stewart R, van Rooyen C, Majoro M, de Wet T, *What is the impact of microfinance on poor people? A systematic review of evidence from sub-Saharan Africa (Protocol)* (The EPPI-Centre is part of the Sosial Science Research Unit, Institute of Education, University of London of the Sosial Science Research Unit, Institute of Education, University of London: 2010) hlm 6

¹² Mulya Siregar, Agenda Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Mendukung Sistem Ekonomi Yang Sehat Di Indonesia: Evaluasi, Prospek Dan Arah Kebijakan, *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002, hlm. 53.

untuk berdaya siang dengan didukung dengan cukup besarnya jumlah LKM dibanding wilayah Jambi yang dapat dicover oleh keberadaan LKM, kemudian dukungan dari jangkauan sebagian besar wilayah Jambi relative terjangkau. Jumlah LKM yang ada di Jambi diperkirakan tidak jauh berbeda dengan jumlah desa di Jambi, terdapat 3,263 dengan kategori beroperasi masih aktif dan beroperasi tidak aktif berdasarkan kategori tersebut LKM Jambi yang aktif 2,346 dan tidak aktif 917 dengan potensi anggota aktif 352,477 dan aktif 253,593 orang tidak aktif 98,884.¹³

Berdasarkan persoalan jangkauan dan demografi LKM di provinsi Jambi sebagaimana temuan Mulya Siregar (2000) tentang calon nasabah yang lebih memilih faktor syariah, Bret (2006) yang menemukan bahwa desa kaya secara signifikan lebih mungkin dapat berpartisipasi daripada desa yang miskin. Maka strategi penguatan potensi dalam menguatkan Modal untuk meningkatkan profitabilitas LKM syariah dalam mempertahankan posisi ketika kebanyakan LKM-LKM di Indonesia terpuruk karena ketidakmampuan menumbuhkan modal, maka banyak pihak menganggap LKM menjadi tidak layak sebagai bank (*unbankable*). Kemudian LKM tersebut akan cenderung mengandalkan modal sendiri atau karena tidak ada pilihan dalam meminjam dana untuk menambah modal selain kepada lembaga keuangan non formal (*money lender*), kelemahan LKM syariah ini umum terjadi.¹⁴

Selain itu soal jangkauan luas dan dalam bagi LKM di Provinsi Jambi dengan jumlah desa dan LKM berbanding rendah dan cukup signifikan sebagai mana yang telah ditemukan oleh Haryadi. Oleh sebab itu untuk menjembati antara jangkauan yang mampu menghasilkan sejumlah calon anggota LKM syariah perlu dukungan aspek operasional dan sumber daya manusia dalam menjalankan rencana bisnis LKM syariah. sedangkan pembahasan aspek keuangan dan pemasaran dilakukan oleh anggota kelompok lainnya. *Islamic Microfinance* ini diusulkan berbentuk koperasi

¹³ Departemen Koperasi RI, Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi 30 Desember 2010.

¹⁴ Suryani, *Analisis efisiensi usaha di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (studi kasus Alfa Dinar)*, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UNS 2004, hlm. 1.

yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong karena sesuai dengan prinsip syariah Islam yang berkeadilan dan saling tolong menolong.¹⁵

PENGUATAN INSTITUSI LKM SYARIAH.

Penguatan Institusi LKM syariah dengan jangkauan dan sumber daya yang professional, selanjutnya juga harus ditingkatkan kemampuan managerial, karena dalam beberapa kasus profesionalitas yang sesuai profesi bagi *account officer (AO)* masih dibawah standar atau belum memiliki standar yang kuat karena persoalan kemudahan dalam pendirian LKM syariah seperti BMT. Sejalan dengan hasil penelitian Ely Siswanto dalam *Strategi Pengembangan BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) Dalam Memberdayakan Usaha Kecil Menengah* perlu meningkatkan manajerial dan pengelolaan keuangan untuk memajukan efisiensi BMT dalam pembiayaan kredit bagi sektor kecil menengah. keseimbangan dalam pengembangan aspek paradigmatic, mengenai aspek bisnis islami sekaligus meningkatkan muatan-muatan Islam dalam setiap perilaku pengelola dan karyawan BMT dengan masyarakat pada umumnya dan klien pada khususnya. Hambatan serta tantangan yang harus diantisipasi masyarakat yang masih rendah akan kemampuan BMT dan eksistensinya dalam memfasilitasi pembiayaan kredit.¹⁶

Beberapa temuan menunjukkan bahwa LKM syariah masih rentan bermasalah dalam persoalan *moral hazard*, sebagaimana beberapa wilayah di Indonesia muncul LKM syariah yang telah menyalahgunakan wewenang dengan memberikan publikasi sesuai dengan prinsip mudhorabah namun justru dana yang telah terhimpun dilarikan, seperti yang terjadi di Yogyakarta terdapat 7 (tujuh) buah BMT yang mengalami masalah manegrial.

Oleh sebab itu dalam wilayah perlu distandardisasi persoalan dengan menganalisis kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah sebagaimana studi kasus

¹⁵ Muhammad Adnan, *Business Plan Project Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah "Mitra Maju Sejahtera": Rencana Operasional Dan Sumber Daya Manusia* (tesis), (Jakarta, FE UI: 2012)

¹⁶ Refky Fielnanda, "Analisis Kesiapan Penerapan Branchless Banking Bank Syariah Dengan Pendekatan Analytic Network Process Bocr (ANP BOCR)." Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.

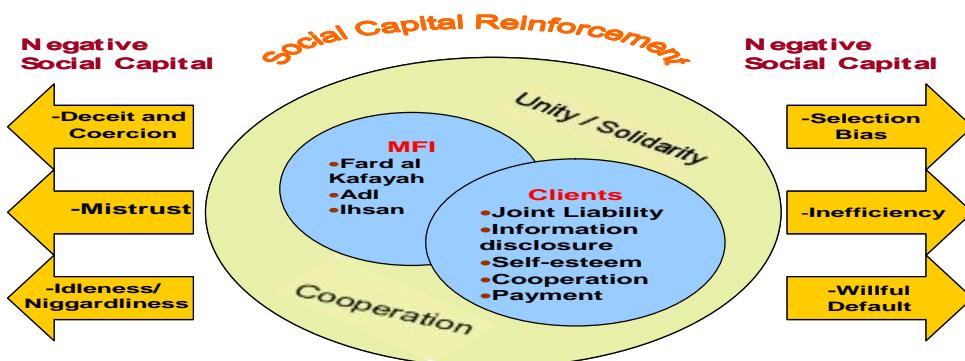
pada Baitul Mal Wattamwil di Provinsi Jambi yang telah dilakukan oleh Besse Wediawati, penelitian ini telah menganalisis hubungan beberapa Baitul Maal Wattamwil (BMT) sebagai Keuangan Mikro Syariah faktor kinerja Lembaga seperti AKPEN, AKPEM, PERPUNG, BIRUP dan LARAP dengan faktor kinerja costumer: JARAK, SELANG, RAYNAS, BAHASTAB, BAHASPIN. Juga untuk mengetahui apakah ada perbedaan dilakukan dengan metode survei pada 150 pelanggan BMT yang digunakan kuesioner. Sampel diambil dengan menggunakan non probability random sampling (metode pengambilan sampel secara proporsional). Data dianalisis dengan korelasi Rank Spearman dan One Way ANOVA ($K > 2$). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) dari 5 faktor kinerja konsumen untuk berhubungan dengan faktor kinerja BMT ini, terdapat tiga faktor menunjukkan korelasi yang signifikan: Pemrosesan kredit (SELANG), bagi hasil tabungan (BAHSTAB) dan pembagian keuntungan kredit (BAHASPIN), faktor-faktor lain: jarak antara pelanggan dan lokasi BMT ini (JARAK) dan pendapatan pelanggan (RAYNAS) tidak menunjukkan korelasi yang signifikan. Meskipun, berdasarkan salah satu cara ANOVAs menganalisis, juga ditemukan dari 5 faktor kinerja, ada 4 (empat) faktor tidak berbeda nyata, mereka AKPEN, AKPEN, PERPUNG dan LARAP. Faktor lain: BIRUP sebagai pengukuran manajemen biaya operasional BMT, menunjukkan ada perbedaan yang signifikan antara tingkat efisiensi BMT Al Amanah dan BMT Al Arif dan antara BMT Al-Ishlah dan BMT Al-Arif.¹⁷

Dalam persolan di atas Muhammad Khaleequzzaman, dalam "*Islamic Microfinance: Outreach and Sustainability*", menjelaskan tentang modal sosial Islam dapat dibentuk dari kepercayaan (trust) antara lembaga dengan nasabah, dan menjadi intrumen dari aksi yang bertalian dengan lembaga dalam setiap agen sosial konomi, nilai ukhuwah (unity) dan solidaritas dapat ditanamkan pada nasabah dan LKM syariah agar dapat memahami prinsip yang lebih baik dari pembagian resiko sebagai ganti dari hanya hutang nasabah dalam keikutsertaan liabilitas hutang pada

¹⁷ Jurnal Manajemen dan Pembangunan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Vol 2 No 2 Tahun 2003

kasus LKM konvensional. Seperti ukuran membentuk kepercayaan akan dapat membantu informasi penuh yang disingkap, menghormati transparansi, dan tidak termasuk masalah agen dan informasi asimetris. Fardu kifayah, keadilan dan ihsan menjadi kekuatan motivasi bagi donnatur, lembaga, dan nasabah (*client*). Kesedian sumberdaya akan mungkin tidak mendapatkan hasil. Nilai-nilai ini jika terlembaga, maka dampak negatif modal sosial dapat dihindari seperti *tadlis*, *gharar*, tidak efisien, kelalaian yang disengaja, ketidakpercayaan, dan lain sebagainya.¹⁸ Sebagaimana dalam gambar di bawah ini.

Gambar Struktur Nilai Lembaga Keuangan Syariah



Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan LKM menurut Suthapa adalah permodalan yang merupakan faktor paling penting dalam mengembangkan LKM, pembinaan pemerintah secara terpadu dan berkelanjutan, pelatihan SDM, adanya kebijakan yang memihak pada LKM, adapun ukuran yang tepat untuk digunakan dalam menilai Kinerja LKM adalah kenaikan laba serta perkembangan usaha, omset, dan asset. Pandangan yang berbeda tentang faktoryang paling

¹⁸ Muhammad Khaleequzzaman, *Islamic Microfinance :An Inclusive Approach with Special Reference to Pakistan*(Second European Research Conference on Microfinance June 16 – 18, Groningen, the Netherlands) lihat juga dalam Muhammad Khaleequzzaman, “*Islamic Microfinance: Outreach and Sustainability*” (A paper presented at IIUM International Conference on Islamic Banking and Finance, 23 – 25 April 2007, Kuala Lumpur, Malaysia)

berpengaruh adalah kualitas SDM, peraturan dan strategi pemerintah dalam membina LKM.¹⁹

Oleh karena itu berdasarkan data di atas, Jambi memiliki potensi LKM yang kuantitas dari LKM yang cukup besar dan dapat didayagunakan untuk kekuatan kapasitas lembaga yang efektif dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan mengentaskan kemiskinan.²⁰ Maka akan berdampak cukup positif bagi ekonomi wilayah.

Namun David Hulme menegaskan bahwa 3 dampak LKM secara umum yaitu pertama, tidak semua potensi lembaga keuangan mikro memberi dampak ekonomi dan sosial yang sangat menguntungkan,²¹ kedua, LKM juga memberi dampak negatif pada keuangan mikro, ketiga, LKM dapat menjadi moderasi akan dampak LKM menguntungkan tetapi tidak sepenuhnya membantu orang yang paling miskin, seperti yang sering diklaim oleh sebahagian pihak.²² Dinamika LKM inilah yang secara kongkret menunjukkan realitas ‘kesejahteraan’ mayoritas masyarakat.²³

Kebijakan Pemerintah berupa bantuan dana bagi LKM di Jambi cukup besar dan diharapkan dapat memberi dampak positif bagi keberlangsungan LKM tersebut, namun masih saja ditemukan LKM yang tidak menggunakan dana sesuai tujuan program bantuan pemerintah, penyebabnya adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia, seleksi, perencanaan, pembinaan, pengawasan, serta kebijakan pemerintah, tingkat pengembalian yang rendah yang diakibatkan gagal dalam meningkatkan kinerjanya.²⁴ Hal ini menegaskan bahwa Pola-pola bantuan

¹⁹I Dewa Gede Suthapa dalam Roberto Akyuwen, dkk, *Teori dan Praktek Keuangan Mikro di Indonesia*, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM: 2010) hlm 214 -217, *Optimalisasi peran Bank perkreditan rakyat dalam penanggulangan kemiskinan di provinsi Jawa barat. Disertasi*, tidak dipublikasikan (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana Univeritas Gajah Mada: 2008)

²⁰ David Hulme, *Impact Assessment Methodologies For Microfinance: Theory, Experience And Better Practice* (United Kingdom: Institute for Development Policy and Management, University of Manchester), hlm. 35-45.

²¹ Holcombe, 1995; Hossain, 1988; Otero dan Rhyne, 1994; Remenyi, 1991; Schuler, Hashemi dan Riley, 1997 dalam David Hulme, *Impact Assessment Methodologies For Microfinance: Theory, Experience And Better Practice*, (UK: Institute for Development Policy and Management, University of Manchester)

²²*Ibid.*,

²³ M. Amin Aziz, *Revitalisasi BMT untuk Kesejahteraan Umat*, makalah disampaikan pada kuliah Umum di syari'ah banking institute, ciputat tanggerang Banten 2005

²⁴*Ibid.*,

teknik yang kurang efektif, antara lain karena penerapan pola umum tersebut secara atas-bawah (top-down) kurang mempertimbangkan aspek kelayakannya menurut kondisi spesifik obyek binaan di lapangan, serta kurang konsistennya dukungan sumberdaya dan lemahnya manajemen dan belum efektifnya mekanisme bawah-atas (bottom-up) di lapangan. Kucuran dana yang diberikan oleh pemerintah belum mengakomodir kebutuhan yang betul-betul real dari koperasi/UMKM.

Pembiayaan syariah pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi dalam laporan neraca keuangan bulan februari tahun 2012 sebesar 2,7 milyar, nilai ini akan tidak sebanding dengan keberadaan LKM syariah di Jambi.

PENUTUP

Berkaitan dengan Potensi kapasitas Lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT yang memiliki keunggulan utuh bila dibandingkan dengan LKM yang lain. BMT bisa memfungsikan diri sebagai jasa keuangan langsung ke sektor riil, memberikan dana sosial sebagai jaminan sosial melalui pengelolaan dana Baitul Maal seperti penghimpunan dana Zakat, Infaq, Shodaqoh serta Wakaf dan memiliki potensi mengembangkan dana ‘*tabaru*’ yang disetor oleh anggota sebagai ‘asuransi bersama’ yang dapat dimanfaatkan dalam kondisi darurat. Konsep ‘asuransi rakyat kecil’ ini merupakan pemanfaatan jaringan *ukhuwah* diantara anggota untuk dapat saling menanggung, sehingga dapat menjamin distribusi rasa keadilan dan kesejahteraan pada masyarakat.²⁵

Persoalan kapasitas lembaga yang kurang menginovasi produk-produk layanan yang dapat menjawab kebutuhan dan permintaan masyarakat di Jambi yang kian meningkat, sebab utama LKM syariah biasa terkesan lemah dalam mensosialisasikan kapasitas lembaga secara legal karena keterbatasan pengetahuan legalitas usaha dan apriori terhadap peraturan daerah yang sering berubah, belum lagi regulasi yang dilakukan pemerintah daerah tidak memiliki kesamaan visi dan misi.

²⁵ Karnaen A.Purwaatmaja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Jakarta, Usaha Kami, 1997) hal 113-124

Pihak regulasi terus berupaya menekankan pada kapasitas internal lembaga untuk penguatan sumber daya insani (SDI) yang memahami teori dan praktik keuangan syariah. Karena alasan tersebut masyarakat lebih memilih untuk menggunakan produk konvesional, karena beberapa produk unggulan dari LKM syariah hanya mampu membuka peluang bagi kalangan terdekat dan tidak dapat memenuhi kebutuhan pasar.

Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kota Jambi memiliki tingkat efisiensi yang berbeda-beda.²⁶ Karena itu pilihan masyarakat akan LKM syariah dipilih berdasarkan tingkat efisiensi yang optimum, kemudian strategi LKM syariah dalam operasionalisasi dituntut sesuai dengan kebutuhan dan permintaan nasabah. Fakta, secara empiris bank penyedia layanan kredit mikro bersaing ketat untuk merebut pangsa pasar kredit mikro yang masih luas.

Pemetaan potensi eksternal pada LKM syariah non-Bank di Jambi diarahkan pada kebijakan pemerintah yang membuka pelatihan lembaga keuangan mikro yang berbasis syariah yang dilaksanakan oleh DEPKOPPERINDAG Kota Jambi. Namun perlu penguatan regulasi yang belum efektif untuk memonitor output pasca pelatihan dan lemahnya pengalaman pengoperasi LKM syariah non bank.

Potensi infrastruktur LKM yang tampak seadanya namun dapat menjadi *home industri* untuk berkembangnya LKM syariah di Kota Jambi, kantor LKM syariah memiliki fungsi ganda satu sisi merupakan rumah tinggal pengelola LKM syariah dan kantor LKM Syariah. Kondisi ini berdampak pada pelayanan LKM syariah non bank terhadap usaha mikro masih lebih ekonomis.

Akhirnya kompleksitas dalam pemetaan pengembangan LKM syariah di kota Jambi akan sangat penting perannya dalam membantu investasi bagi usaha mikro dan kecil. Penelitian ini akan menjelaskan peta potensial LKM syariah non bank di kota Jambi. Sehingga ditemukan sebuah formulasi strategi yang efektif dalam pengembangan LKM syariah non-bank di kota jambi.

²⁶ Besse Widiwaati, *Analisis Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada Baitul Mal Wattamwil di Provinsi Jambi)* (Jurnal Manajemen dan Pembangunan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jambi, Vol 2 No 2 Tahun 2003)

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Salam, *Koperasi Simpan Pinjam: Sustainabilitas Lembaga Keuangan Mikro*, Working Paper In Interdisciplinary Studies, (Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana UGM, 2008)
- Adiwarman Karim, “Menimbang Risiko Kredit di Bank Syariah”. (Majalah Investor No.88 Tahun V. Jakarta: 2003)
- Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Rajagrafindo Persada, 2008: 10) hlm 60
- Adiwarman karim, *Teori ekonomi makro Islam*, (Jakarta, PT Rajagrafindo, 2007), 2013.
- Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Maal*, (Bandung, CV. Pustaka setia: 2013)
- Amyria Yulita, *Strategi Meningkatkan Volume Penjualan Dengan Pendekatan Marketing Mix Dan Analisis Swot Pada Pt Interbis Sejahtera Palembang*
- Andri Soemitro, *Bank dan Lembaga keuangan Syariah*, (Jakarta, Kencana Predana media Group: 2009)
- Asian Foundation, *Microfinance Service in Indonesia: Survey of Institutions in 6 Provinces*, (2002)
- Bank Indonesia, *Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank Dalam Pembiayaan Komoditas Terpilih Umkm Dari Tiga Sektor Penyumbang Pdrb Terbesar Di Jawa Tengah*, Merupakan executive summary Hasil Penelitian Kantor Bank Indonesia Semarang bekerjasama dengan Center for Micro and Small Enterprise Dynamics (CEMSED) Fakultas Ekonomi UKSW Salatiga)
- Besse Widiawati, Jurnal Manajemen dan Pembangunan Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Jambi Vol 2 No 2 Tahun 2003
- Buchori Alma, *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa* (Bandung, Alfabetika: 2005)
- Budi Juwono, *Strategi PT.Nanda Bangun Nusa untuk mempertahankan posisinya sebagai market leader dalam agribisnis pertamanan pada hotel berbintang lima di Bali.*

Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga keuangan*, (Jakarta, Lembaga Penerbitan FE UI:1999)

David Hulme, *Impact Assessment Methodologies For Microfinance: Theory, Experience And Better Practice*, (UK, Institute for Development Policy and Management, University of Manchester)

Departemen koperasi RI dalam Rekapitulasi Data Koperasi Berdasarkan Provinsi 30 Desember 2010

Ely Siswanto, *Strategi Pengembangan BMT (Baitul Maal Wa Tamwil) Dalam Memberdayakan Usaha Kecil Menengah*, (Malang, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang)

Eriyati, *FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERMINTAAN PEMBIAYAAN KREDIT PADA PT. BANK BRI SYARIAH PEKANBARU*

Fandy Tjiptono dan Singgih Santoso, *Riset Pemasaran: Konsep dan Aplikasi dengan SPSS* (Jakarta: PT. Elex Media Kompetindo Kelompok Gramedia: 2001)

Haryadi, *Profil Dan Permasalahan Umkm Di Provinsi Jambi*, Studi Potensi dan Pembinaan UMKM di Provinsi Jambi tahun 2009

Heri Sudarsono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi Dan Ilustrasi*, (Yogyakarta, Ekonisa: 2007) cet ke 4

I Dewa Gede Suthapa, *Optimalisasi peran Bank perkreditan rakyat dalam penanggulangan kemiskinan di provinsi Jawa barat*. Disertasi, tidak dipublikasikan (Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana Universtas Gajah Mada: 2008)

Ibrahim Warde, *Islamic Finance: Kenangan Islam Dalam Perekonomian Global*, (Edinburgh, Edinburgh University Press:2000) diterj, (Yogyakarta, Pustakapelajar: 2009)

Karnaen A. Purwaatmaja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, (Jakarta, Usaha Kami, 1997)

Lincoln Arsyad, *Lembaga Keuangan Mikro: institusi, kinerja dan sustainabilitas*, (Yogyakarta, penerbit Andi: 2008)

M Amin Aziz, *Pendekatan Grameen Bank untuk BMT*, Republika online, 27 Agustus 2009

M. Amin Aziz, *Revitalisasi BMT untuk Kesejahteraan Umat*, makalah disampaikan pada kuliah Umum di syari'ah banking institute, Ciputat tanggerang Banten 2005

Marguerite S. Robinson, *The Microfinance Revolution*, tahun 2002 terhadap Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Masri Singarimbun dan Sofian Efendi, *Metode Penelitian Survei*(Jakarta:PT. Pustaka LP3ES:1995)

Microcredit Summit (1997) pada Microcredit Summit di New York tahun 2002

Mohammad Khaled, *Building A Succesfull Business Model For Islamic Microfinance*, (Valladolid-Spain, global Microcredit summit commissioned workshop paper, November 14-17 , 2011) hlm 3

Mohammed Abubakar Mawoli, *Effective Market Segmentation And Viability Of Islamic Banking In Nigeria*, (Australian Journal of Business and Management Research Vol.1 No.10 [01-09] January-2012)

Muchdarsyah Sinungan, “*Manajemen Dana Bank*”;,(Jakarta, Penerbit Bumi Aksara: 1993). Edisi Kedua, Cetakan Pertama

Muhammad Adnan, *Business Plan Project Pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syariah “Mitra Maju Sejahtera”*: Rencana Operasional Dan Sumber Daya Manusia (tesis), (Jakarta, FE UI: 2012)

Muhammad, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, FE UII: 2000)

Muhammad, *Lembaga keuangan syariah*, (Yogyakarta, Graha Ilmu: 2007)

Mulya Siregar, *Agenda Pengembangan Perbankan Syariah Untuk Mendukung Sistem Ekonomi Yang Sehat Di Indonesia: Evaluasi, Prospek Dan Arah Kebijakan*, (IQTISAD Journal of Islamic Economics, Vol. 3, No. 1, Muharram 1423 H/Maret 2002)

- Naresh K. Malhotra, *Riset Pemasaran*, (Jakarta : PT. Indeks Kelompok Gramedia: 2005) Jilid 1
- Nugroho J Setiadi, *Perilaku Konsumen, Konsep dan Implikasi untuk Strategi dan Penelitian Pemasaran*. (Bogor, Kencana:2003)
- Patriadi Pandu, *Segi Hukum bisnis dalam kebijakan privatisasi BUMN melalui penjualan saham di pasar modal indonesia”*
- Philip Kotler, dan Gary Armstrong..*Dasar-dasar Pemasaran*,(Jakarta: PT. Indeks Kelompok Media: 2003) Edisi Kesembilan
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, Implementasi dan Pengendalian*. (Jakarta, Prentice Hall: 1997)
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*; Edisi Milenium, (Jakarta,Prenhallindo: 2002) Jilid 1.
- Prathama Rahardja, “*Uang dan Perbankan*”; (Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta: 1997) Cetakan Ketiga
- Rachmat Hendayana dan Syahrul Bustaman, *Penomena Lembaga keuangan Mikro Dalam Perspektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan*, (Bogor, Balai Pengkajian dan pengembangan teknologi Pertanian, 2006).
- Refky Fielnanda, "Analisis Kesiapan Penerapan Branchless Banking Bank Syariah Dengan Pendekatan Analytic Network Process Boctr (ANP BOCR)." Tesis Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Roberto Agyuwen, dkk. *Teori dan Praktek: Keuangan mikro di Indonesia*, (Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana UGM: 2010)
- Serli Wijaya, dan Gunawan Adi Chandra. 2006. *Analisa Segmentasi, Penentuan target dan Posisi Pasar Pada Restoran Steak dan Grill di Surabaya*, dalam Jurnal Manajemen Perhotelan. Vol 25 no.3
- Sri Hayati dan Hayati Suroso, ”*analisis strategi bersaing pada PD BPR BKK Mandiraja Kabupaten Banjarnegara*”Jurnal Manajemen dan Pembangunan Jurusan Manajemen Fak. Ekonomi Vol 2 No 2 Tahun 2003

Stewart R, van Rooyen C, Majoro M, de Wet T, *What is the impact of microfinance on poor people? A systematic review of evidence from sub-Saharan Africa* (Protocol) (The EPPI-Centre is part of the SosialScience Research Unit, Institute of Education, University of London of the Sosial Science Research Unit, Institute of Education, University of London: 2010)

Suryani, *Analisis efisiensi usaha di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (studi kasus Alfa Dinar)* tahun 2004

Anonim, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

Widayat dan Amirullah, *Riset Bisnis*, Edisi 1. (Malang , Cahaya Press:2002)

Zamir Iqbal, *Islamic Financing system*, (Jurnal Finance and development: 1997)